

# Akuntansi Berbasis Tradisi: Pengelolaan Aset Komunal di Kampung Naga Studi Etnografi Mengenai Mekanisme Pencatatan, Distribusi, dan Transparansi Keuangan Adat

Nadya Rachmawati Putri<sup>1</sup>, M Rayhan Adriansyah<sup>2</sup>, Erika Sufianty<sup>3</sup>, Eli Nurlina<sup>4</sup>,  
Ghilman Kayyisa Rachman<sup>5</sup>, Almaas Rizkia Fatihah<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan

Email: [nadyarachmawati310@gmail.com](mailto:nadyarachmawati310@gmail.com)<sup>1</sup>, [rayhanardiansyah2006@gmail.com](mailto:rayhanardiansyah2006@gmail.com)<sup>2</sup>, [erikasufianty06@gmail.com](mailto:erikasufianty06@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[elinurlina81@gmail.com](mailto:elinurlina81@gmail.com)<sup>4</sup>, [ghilman.kayyisa23@gmail.com](mailto:ghilman.kayyisa23@gmail.com)<sup>5</sup>, [almaasrizkiafatihah@gmail.com](mailto:almaasrizkiafatihah@gmail.com)<sup>6</sup>

## Article Info

### Article history:

Received December 27, 2025

Revised January 01, 2025

Accepted January 10, 2026

### Keywords:

Indigenous Accounting,  
Communal Assets, Kampung  
Naga, Accounting  
Ethnography, Financial  
Transparency, Local Wisdom

## ABSTRACT

*This study is grounded in a critique of modern accounting, which is predominantly profit-oriented and tends to neglect sustainability and collective values, thereby necessitating an alternative model based on local wisdom. The focus of the study is the practice of collective asset management by the indigenous community of Kampung Naga, which is carried out effectively and transparently without formal accounting rules. The aim is to propose a non-capitalistic accounting model that emphasizes sustainability, collectivity, and cosmic balance (the triadic principles of local wisdom), while also explaining the processes of recording, distribution, and financial transparency from an accounting perspective. The theoretical framework employed includes Indigenous Accountability, Critical Accounting, Accounting Ethnography, and the concept of Common Pool Resources by Elinor Ostrom. Data were collected through literature review, previous studies, and written records concerning the customary accounting practices of Kampung Naga, and were analyzed using hermeneutic and thematic approaches. The results show that despite not applying formal standards such as PSAK or IFRS, the Kampung Naga community is able to manage collective assets transparently through oral record-keeping and customary deliberation, with the leuit serving as the center of assets and economic reserves. This study concludes that the tradition-based accounting of Kampung Naga represents an authentic and relevant model of sustainability accounting as an alternative to profit-oriented modern accounting.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received December 27, 2025

Revised January 01, 2025

Accepted January 10, 2026

### Keywords:

Akuntansi Adat, Aset  
Komunal, Kampung Naga,  
Etnografi Akuntansi,  
Transparansi Keuangan,  
Kearifan Lokal

## ABSTRACT

Penelitian ini dilandasi oleh kritik terhadap akuntansi modern yang berorientasi pada laba dan cenderung mengabaikan keberlanjutan serta nilai-nilai kolektif, sehingga diperlukan model alternatif berbasis kearifan lokal. Fokus penelitian adalah praktik pengelolaan aset bersama oleh komunitas adat Kampung Naga yang dilakukan secara efektif dan transparan tanpa aturan akuntansi formal. Tujuannya untuk menawarkan model akuntansi non-kapitalistik yang menekankan keberlanjutan, kolektivitas, dan keseimbangan kosmos (trias kearifan lokal), sekaligus menjelaskan proses pencatatan, pembagian, dan transparansi keuangan dari perspektif akuntansi. Kerangka teori yang digunakan meliputi Akuntabilitas Adat, Akuntansi Kritis, Etnografi Akuntansi, serta konsep *Common Pool Resources* dari Elinor Ostrom. Data dikumpulkan melalui studi

literatur, penelitian terdahulu, dan catatan tertulis mengenai praktik akuntansi adat Kampung Naga, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak menggunakan standar formal seperti PSAK atau IFRS, Kampung Naga mampu mengelola aset kolektif secara transparan melalui pencatatan lisan dan musyawarah adat, dengan leuit sebagai pusat aset dan cadangan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntansi berbasis tradisi Kampung Naga merupakan model akuntansi keberlanjutan yang otentik dan relevan sebagai alternatif bagi akuntansi modern yang berorientasi laba.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Nadya Rachmawati Putri

Universitas Pasundan

Email: [nadyarachmawati310@gmail.com](mailto:nadyarachmawati310@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Kampung adat memiliki nilai sejarah, sosial, dan budaya yang signifikan. Perkampungan adat di Indonesia menunjukkan keragaman budaya dan tradisi lokal selain menjadi daya tarik wisata. Salah satu cara untuk melestarikan budaya lokal sekaligus meningkatkan ekonomi lokal adalah dengan mengembangkan perkampungan adat sebagai objek wisata. Ini terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana wisata perkampungan adatnya telah menjadi salah satu cara untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Kampung Naga kepada masyarakat luar. Perkampungan adat adalah tempat di mana masyarakat tradisional tetap menjaga kebiasaan dan budaya leluhur mereka. Kusumawati, Purwantiasning, dan Anisa (2017), Kampung adat atau desa yang dihuni oleh masyarakat tradisional, dimana pola hidup dan keseharian masyarakatnya masih menjunjung tinggi adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur.

Sebagai upaya untuk mempertahankan nilai budaya lokal, masyarakat kampung adat mempertahankan adat istiadat yang telah berlangsung sejak lama. Namun, mereka tetap terbuka terhadap pengaruh luar melalui menerima kunjungan dari masyarakat luar, seperti di Kampung Naga Tasikmalaya, yang merupakan tempat wisata budaya. Karena keadaan ini, perlu ada pemerintahan perkampungan adat yang jelas dengan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Bagaimana orang melihat kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip dasar akuntansi, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, norma dan budaya setempat mengubah praktik akuntansi komunitas adat. Di sana, pelaporan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, bukan hanya secara tertulis. Dalam kasus ini, transparansi tidak semata-mata diukur dari keakuratan data tetapi juga diukur dari seberapa transparan informasi disampaikan dan apakah itu sesuai dengan prinsip dan kepercayaan masyarakat.

Untuk membuat akuntansi lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang belum mengenal standar akuntansi formal, ekonomi lokal yang berbasis komunitas seringkali melakukan perubahan yang lebih fleksibel. Prinsip akuntansi dasar seperti pencatatan utang,

pembagian keuntungan, dan pengakuan pendapatan dimasukkan dalam catatan ini. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat membantu masyarakat memahami fungsi akuntansi secara lebih praktis dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana pengelolaan aset komunal diatur dan dikelola sesuai aturan adat? (2) bagaimana mereka mencatat dan membagi asset bersama tanpa akuntansi formal? (3) apa nilai sosial dan budaya yang mendasari praktik pencatatan mereka? (4) apakah praktik tradisional tersebut mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Kajian Pustaka (Studi Literatur), yang berarti kami melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi yang sudah ada dari berbagai sumber terpercaya di internet, bukan dengan turun langsung ke lokasi atau melakukan wawancara. Sumber data utama yang kami gunakan meliputi Artikel Jurnal Ilmiah, Buku, Skripsi yang merupakan karya tulis akademis, dan Dokumen Resmi yang memuat publikasi kredibel terkait adat dan budaya Kampung Naga. Fokus utama kami dalam menganalisis sumber-sumber ini adalah mencari tahu tentang bagaimana aturan adat mengatur aset bersama (komunal), bagaimana cara mereka "mencatat" dan membagi hasil tanpa menggunakan buku akuntansi modern, serta nilai-nilai budaya apa yang mendasari praktik-praktik tersebut. Setelah semua informasi terkumpul, kami kemudian menggabungkan dan menyimpulkan temuan-temuan dari literatur tersebut untuk menyusun gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai sistem pengelolaan aset tradisional di Kampung Naga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun praktik pengelolaan keuangan di Kampung Naga sangat berbeda dari sistem akuntansi modern, ia terbukti efektif dan stabil bagi komunitas adat tersebut. Sistem keuangan mereka didasarkan pada kepercayaan sosial yang mutlak kepada para pemimpin adat sebagai kontrol utama, menghilangkan kebutuhan akan kepemilikan pribadi atas aset strategis. Tokoh adat bertindak sebagai "akuntan" yang menjaga informasi terkait pemasukan dan pengeluaran melalui penyampaian lisan, hafalan, dan aturan adat yang dipahami bersama. Semua aset komunal dikelola untuk kepentingan bersama, yaitu membiayai acara adat, bantuan sosial, dan pemeliharaan fasilitas, dengan proses distribusi hasil yang selalu dimusyawarahkan secara terbuka untuk menjamin keadilan. Transparansi dan akuntabilitas dijaga melalui forum adat yang melibatkan seluruh warga, memungkinkan pengajuan pertanyaan dan meminimalkan potensi konflik. Secara keseluruhan, akuntansi adat Kampung Naga menunjukkan bahwa sistem tradisional dapat menjadi stabil dan transparan, dengan kepercayaan dan musyawarah sebagai pilar utama yang berhasil menguatkan solidaritas sosial dan keseimbangan ekonomi lokal.

### **Pembahasan**

## **Pengaturan dan Pengelolaan Aset Komunal Berdasarkan Adat**

Pendekatan pengelolaan aset komunal berbasis masyarakat adat telah berkembang sebagai salah satu teori kontemporer dalam kajian pengelolaan sumber daya bersama. Teori ini menegaskan bahwa masyarakat lokal memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya komunal secara berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh pada regulasi negara maupun sistem kepemilikan privat. Kapasitas tersebut didukung oleh kekuatan relasi sosial, pengetahuan ekologis yang diwariskan secara turun-temurun, serta legitimasi budaya yang mengikat anggota komunitas.

Agrawal dan Gibson (2015) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama sangat dipengaruhi oleh kekuatan institusi lokal dan tingkat partisipasi komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Aturan yang dirumuskan dan dijalankan oleh komunitas sendiri cenderung lebih efektif karena memiliki legitimasi sosial serta selaras dengan nilai dan prinsip budaya lokal. Dalam konteks ini, kepemimpinan lokal dan adat istiadat berperan sebagai mekanisme tata kelola yang mengatur akses, pemanfaatan, dan perlindungan aset komunal.

Selanjutnya, Dressler et al. (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya berbasis komunitas tidak hanya mencakup aspek teknis atau ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan moral masyarakat. Perilaku pengelolaan sumber daya dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, serta hubungan spiritual antara manusia dan alam. Oleh karena itu, keberlanjutan aset komunal tidak semata-mata dijamin oleh peraturan formal, melainkan juga oleh kontrol sosial dan kepatuhan moral yang tumbuh dalam komunitas.

Prinsip utama Community-Based Natural Resource Management (CBNRM), seperti partisipasi kolektif, kejelasan batas aset, dan legitimasi sosial dalam tata kelola, relevan untuk menjelaskan praktik pengelolaan aset komunal di Kampung Naga. Praktik tersebut tercermin dalam penerapan hukum adat, pembagian zonasi wilayah, penggunaan pamali sebagai bentuk pengendalian sosial, serta peran tokoh adat dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem adat Kampung Naga dapat dipahami sebagai contoh konkret pengelolaan aset komunal berbasis komunitas yang sejalan dengan teori dan kajian akademik kontemporer (Astuti & Prasetyo, 2020)

## **Mekanisme Pencatatan dan Pembagian Aset Tanpa Akuntansi Formal**

Dalam masyarakat tradisional seperti Kampung Naga, praktik pencatatan dan pertanggungjawaban tidak dilakukan melalui sistem akuntansi formal dengan laporan tertulis atau angka yang kompleks seperti pada sistem bisnis modern. Sebaliknya, pencatatan sosial terjadi secara kolektif dan komunikatif, yaitu melalui pertemuan adat, ingatan bersama, serta komunikasi lisan yang dilakukan secara terbuka di hadapan warga. (Saepitri, 2017)

Dalam perspektif antropologi sosial, pencatatan sosial seperti ini bukanlah kekurangan sistem justru merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial yang efektif dalam komunitas adat. Menurut teori antropologi sosial yang dijelaskan dalam buku *Teori-Teori Antropologi* yang disusun oleh akademisi (antropologi, 2025), masyarakat tradisional mampu membentuk sistem sosial yang tertata tanpa pencatatan formal karena struktur sosial mereka dibangun atas nilai budaya, hubungan kekerabatan, dan norma kolektif., masyarakat tradisional mampu

membentuk suatu sistem sosial yang tertata dan terstruktur tanpa pencatatan formal, karena struktur sosial mereka terbangun atas dasar keterikatan nilai budaya, hubungan kekerabatan, dan norma yang dipahami dan dijalankan bersama oleh anggota komunitas. Struktur sosial ini mengatur interaksi sosial, pembagian kerja, serta mekanisme kontrol sosial agar masyarakat tetap harmonis dan bertanggung jawab terhadap penggunaan aset bersama.

Dalam konteks Kampung Naga, mekanisme ini diterapkan melalui forum adat yang bersifat terbuka. Tokoh adat bertindak sebagai mediator yang menyampaikan informasi tentang pemanfaatan aset komunal dan hasil panen kepada seluruh warga. Semua anggota masyarakat berpartisipasi dalam diskusi, memberikan masukan, serta menyetujui keputusan melalui musyawarah adat. Proses ini memungkinkan seluruh warga mengetahui bagaimana aset digunakan, bagaimana hasil dibagi, dan siapa yang bertanggung jawab tanpa perlu buku pembukuan formal (Saepitri, 2017).

Selain itu, penelitian oleh (Wulandari & Haryanto, 2020) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa dalam banyak komunitas adat di Indonesia, akuntansi tradisional menekankan keterbukaan sosial, nilai keadilan, dan kepercayaan, bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Akuntansi dalam konteks ini dipahami sebagai suatu mekanisme sosial yang menjaga hubungan antaranggota dan keseimbangan komunitas, bukan sekadar alat teknis.

Karena itu, walaupun tidak ada pencatatan formal berbasis buku, masyarakat Kampung Naga tetap mampu menjalankan fungsi pencatatan, pengendalian, dan pembagian aset secara efisien melalui mekanisme sosial budaya yang terinternalisasi kuat di dalam komunitas mereka.

### **Nilai Sosial dan Budaya sebagai Fondasi Pengelolaan**

Nilai sosial dan budaya menjadi dasar penting dalam cara masyarakat Kampung Naga mencatat dan mengelola aset milik bersama. Dalam masyarakat adat, mencatat tidak dianggap sebagai pekerjaan berbasis dokumen tertulis semata, melainkan bagian dari sistem nilai yang hidup dan dilakukan bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sibarani, 2014) bahwa kearifan lokal berperan sebagai pedoman moral dan sosial yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, serta nilai spiritual. Di Kampung Naga, nilai-nilai itu diwujudkan melalui sikap patuh pada hukum adat, aturan pamali, serta penghormatan terhadap warisan dari leluhur.

(Permana, 2014) menyebutkan bahwa sistem adat di Kampung Naga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang kuat dalam menjaga pengelolaan sumber daya bersama. Nilai-nilai seperti jujur, tanggung jawab bersama, dan sederhana menjadi pedoman yang mengikat seluruh warga komunitas. Karena itu, proses pencatatan aset tidak membutuhkan dokumen tertulis resmi. Tingginya kepercayaan sosial membuat setiap orang merasa memiliki kewajiban moral untuk menjaga penggunaan aset dan melaporkannya secara terbuka melalui forum adat serta musyawarah.

Selain itu, Saepitri (2017) menegaskan bahwa akuntabilitas dalam masyarakat adat Kampung Naga bersifat sosial dan spiritual, bukan hanya sekadar administratif. Tokoh adat bertanggung jawab tidak hanya kepada warga masyarakat, tetapi juga kepada nilai-nilai leluhur dan keyakinan spiritual yang dianut bersama. Dengan demikian, cara mencatat melalui lisan, mengingat bersama, serta terbukanya informasi dalam pertemuan adat mencerminkan sistem



akuntansi yang didasarkan pada nilai-nilai (value-based accounting) yang menekankan etika, kerja sama, dan keseimbangan sosial.

Berdasarkan nilai gotong royong, solidaritas, dan kepatuhan terhadap adat, masyarakat Kampung Naga berhasil menjaga keberlanjutan aset milik bersama secara konsisten. Nilai-nilai sosial dan budaya ini membentuk cara pengelolaan dan pencatatan aset yang tidak resmi tetapi tetap efektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun cara ini tidak sesuai dengan standar akuntansi modern, hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana praktik tersebut dilakukan.

### **Cerminan Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengendalian dalam Praktik Tradisional**

Praktik pengelolaan aset komunal yang dijalankan masyarakat Kampung Naga pada dasarnya telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian, meskipun tidak dilakukan melalui sistem akuntansi formal sebagaimana yang dikenal dalam akuntansi modern. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme sosial dan adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat (Wulandari & Haryanto, 2020).

Transparansi dalam pengelolaan aset komunal terlihat dari keterbukaan informasi yang disampaikan secara langsung kepada seluruh warga melalui musyawarah adat. Setiap keputusan terkait penggunaan aset bersama, seperti hasil panen atau pemanfaatan sumber daya alam, dibahas dan diketahui oleh anggota komunitas. Keterbukaan ini tidak bergantung pada laporan tertulis, melainkan pada penyampaian lisan yang dilakukan secara terbuka dan berulang, sehingga seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Pola ini menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk dokumen akuntansi, tetapi dapat terbangun melalui komunikasi sosial yang konsisten dan partisipatif.

Akuntabilitas dalam praktik tradisional Kampung Naga tercermin dari tanggung jawab tokoh adat dalam mengelola dan menjaga aset komunal. Tokoh adat tidak hanya bertindak sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada masyarakat secara moral dan sosial. Bentuk pertanggungjawaban ini bersifat kolektif, di mana kepercayaan masyarakat menjadi dasar utama. Apabila terjadi penyimpangan terhadap aturan adat, maka sanksi sosial dan adat akan diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di Kampung Naga tidak diukur melalui laporan keuangan formal, melainkan melalui kepatuhan terhadap nilai adat dan pengawasan sosial komunitas (Saepitri, 2017).

Selain itu, pengendalian dalam sistem pengelolaan aset Kampung Naga dijalankan melalui aturan adat, pamali, dan pembagian zonasi wilayah yang jelas. Pembatasan terhadap pemanfaatan hutan, lahan pertanian, dan sumber daya lainnya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang efektif. Seluruh anggota masyarakat memahami batasan-batasan tersebut dan secara kolektif mengawasi pelaksanaannya. Pengendalian ini bersifat preventif karena ditanamkan sejak awal melalui nilai budaya dan norma yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga potensi penyalahgunaan aset dapat diminimalkan tanpa memerlukan sistem pengawasan formal (Astuti & Prasetyo, 2020; Permana, 2014).

Dengan demikian, praktik tradisional pengelolaan aset di Kampung Naga secara nyata telah mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian dalam bentuk yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat adat. Sistem ini

membuktikan bahwa akuntansi tidak selalu harus berbasis angka dan dokumen tertulis, melainkan dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban sosial yang hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat.

## KESIMPULAN

Pengelolaan aset komunal berbasis masyarakat adat menunjukkan bahwa komunitas lokal mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan melalui institusi adat, partisipasi kolektif, dan legitimasi budaya. Prinsip CBNRM tercermin dalam praktik Kampung Naga melalui hukum adat, zonasi wilayah, pamali, dan peran tokoh adat, sehingga sistem adat tersebut menjadi contoh pengelolaan aset komunal yang sejalan dengan kajian akademik kontemporer.

Di Kampung Naga, pencatatan dan pertanggungjawaban aset dilakukan melalui mekanisme sosial seperti musyawarah adat, ingatan bersama, dan komunikasi lisan, bukan melalui sistem akuntansi formal. Dalam perspektif antropologi sosial, cara ini efektif karena didukung oleh nilai budaya, hubungan kekerabatan, dan norma kolektif yang menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian aset komunal.

Nilai sosial dan budaya menjadi dasar pencatatan dan pengelolaan aset komunal di Kampung Naga. Melalui kepatuhan pada hukum adat, pamali, dan musyawarah, mekanisme lisan dan kepercayaan sosial berfungsi sebagai akuntabilitas yang efektif, menunjukkan bahwa praktik akuntansi bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh nilai budaya masyarakat.

Praktik pengelolaan aset komunal di Kampung Naga telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian melalui mekanisme adat dan sosial, meskipun tanpa sistem akuntansi formal. Transparansi diwujudkan melalui musyawarah adat, akuntabilitas melalui tanggung jawab moral tokoh adat, serta pengendalian melalui aturan adat, pamali, dan zonasi wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntansi dapat dijalankan secara kontekstual sebagai mekanisme pertanggungjawaban sosial yang hidup dalam budaya masyarakat adat.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset milik bersama warga Kampung Naga berlangsung berdasarkan hukum adat yang kuat. Aset tersebut dimiliki dan digunakan bersama oleh seluruh masyarakat, dengan pengawasan yang dilakukan oleh tokoh adat melalui proses musyawarah bersama. Meskipun tidak ada sistem akuntansi resmi, pencatatan dan pembagian aset tetap dilakukan secara lisan dan melalui mekanisme sosial, dengan dasar kesepakatan bersama yang berlandaskan hukum adat. Hal ini membuat pengelolaan aset tetap terasa adil dan efektif. Praktik ini didorong oleh nilai-nilai sosial dan budaya seperti gotong royong, persaudaraan, rasa tanggung jawab bersama, sederhana, serta sikap hormat terhadap alam dan nenek moyang. Secara nyata, sistem tradisional ini mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian. Hal ini terwujud melalui forum adat yang terbuka, pertanggungjawaban moral dari tokoh adat, serta pengawasan sosial yang berlandaskan norma dan adat istiadat. Dengan demikian, akuntansi berbasis tradisi di Kampung Naga menunjukkan bahwa ada alternatif sistem akuntansi yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- antropologi, T. (2025). *Teori-teori antropologi*. Universitas Negeri Medan. <https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/52628/1/Book.pdf>
- Astuti, W., & Prasetyo, S. H. (2020). Sistem Pengelolaan Lahan Pertanian dan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga. *Jurnal Geografi*, 12(2), 175–188. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jg/article/view/19987/8944>
- Permana, A. (2014). *Pikukuh adat sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya alam di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya* [Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu/32453/>
- Saepitri, R. (2017). *Akuntansi Pertanggungjawaban pada Komunitas Adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya (Tugas Akhir)*. Universitas Komputer Indonesia [Universitas Komputer Indonesia]. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2129/9/UNIKOM\\_RinaSaepitri\\_12. BAB II PEMBAHASAN MASALAH DAN SOLUSI MASALAH.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2129/9/UNIKOM_RinaSaepitri_12.BAB%20II%20PEMBAHASAN%20MASALAH%20DAN%20SOLUSI%20MASALAH.pdf)
- Sibarani, R. (2014). *Kearifan Lokal: Hakikat, Makna, dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal*. Media Persada. <https://books.google.co.id/books?id=oC5oEQAAQBAJ>
- Wulandari, Y., & Haryanto. (2020). Akuntansi tradisional dan nilai budaya dalam pengelolaan keuangan desa adat di Bali. *Jurnal Akuntansi Undiksha*, 11(2), 120–135. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24959>